RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PATIANROWO

TAHUN 2023

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PATIANROWO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Nganjuk,
a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. CAMAT PATIANROWO
Sekretaris Camat

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK

TONI SOESANTO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19801123 199912 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu

dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;

w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;

y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

bb. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patianrowo ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Patianrowo guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patianrowo ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mentapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATIANROWO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Patianrowo
2.2 Sumber Daya Kecamatan Patianrowo
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patianrowo
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN PATIANROWO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patianrowo
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan
4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi
5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATIANROWO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Patianrowo

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Patianrowo.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

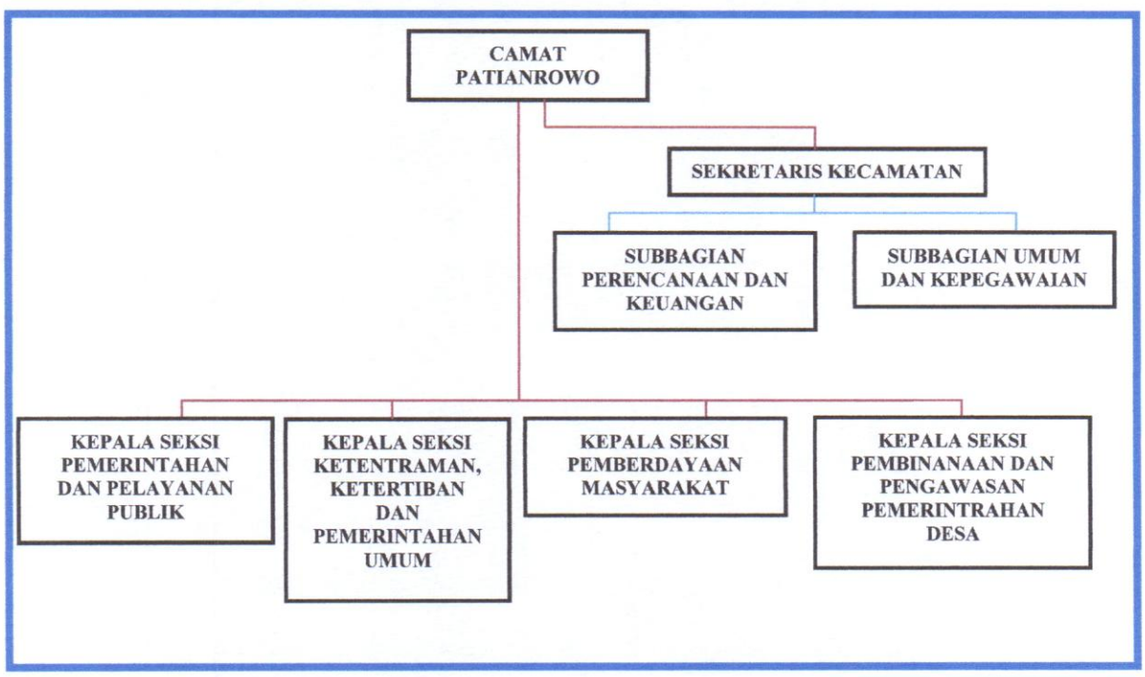
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintah yang di limpahkan kepada camat;
e. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai Tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaa keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melakasaan sosialisasi peraturan perundang-undnagan; dan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f) Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.]

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Patianrowo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Patianrowo adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 6 (enam), yang terisi sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dan dibantu oleh 8 (Delapan) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	0
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4	Subbagian	0
4.	Staf/PNS	8
6.	THL	6
	Jumlah	18

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Patianrowo sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	0
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	2
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	0
7.	Pengatur Tingkat I	II/ d	3
8.	Pengatur	II/c	2
9.	Pengatur Muda	II/b	1
10.	Juru Muda Tingkat I	I/d	1
Jumlah			12

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	6
3.	D3	0
4.	SMA	5
5.	SMP	0
	JUMLAH	12

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
     - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
   - Roda dua sebanyak 2 (dua)Unit yaitu Honda Supra X 125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 23 buah
   - Meja layanan : 1 (satu) buah
   - Meja Rapat : 2 (dua) buah
   - Kursi : buah
   - Kursi Tunggu : 5 (lima) buah
   - Komputer khusus KTP SIAK : 2 (dua) unit (1 rusak)
   - Komputer e-KTP : 1 (satu) unit
   - Laptop : 8 (Delapan) unit
   - Mesin Ketik : 1 (satu)unit
   - Printer : 6 (enam) unit
   - Kamera Canon : 1 (satu) unit
   - Personal Computer : 4 (empat) unit (1 rusak)
   - Fax mail : 1(satu) unit

- Filling cabinet : 2 (dua) unit
- Lemari kayu kaca : 2 (dua) buah
- Smart Tv : 1 (satu) unit
- Lemari kayu terbuka : 2 (dua) buah
- Lemari besi : 1 (satu) buah
- Sofa tamu : 1 (satu) set
- Tv 21 inch : 2 (dua) unit
- Tv 36 inch : 1 (satu) unit
- Tv 32 Inch : 1 (satu) inch
- Filling Kabinet : 3(tiga) unit
- Lemari Arsip : 3 (tiga) unit
- Rak Kayu dan kaca : 2 (dua) buah
- Kursi pejabat : 8 (delapan)buah
- Rak Arsip : 2 (dua) buah
- Lemari kayu : 1 (satu) buah
- Rak kayu : 2 (dua) buah (1 rusak)
- Ac : 7 (tujuh) unit
- Kipas angis : 2 (dua) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Patianrowo

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Patianrowo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				415	450	410	515	558	430	485	385	530	693	103,6	107,7	93,90	102,91	124,93
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	168	177	183	100	100	100	100	99,38
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator "Jumlah Pelayanan Umum", realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan "*excellent service*" (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator "Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi", pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	-	-	-	1.512.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-	-	-	-	2.161.786.646	-	-	-	-	1.615.263.123	-	-	-	-	71,23		
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	.2.220.000	-	-	-	-	2.220.000	-	-	-	-	100		
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	88.635.750	-	-	-	-	56.647.550	-	-	-	-	60,41		

5	Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					73.234.000				95.445.000							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.632.876.192	1.852.203.768	2.445.707.488	2.105.161.358	-	1.346.195.681	1.037.089.262	1.866.305.676	2.071.950.258	-	84,44	55,99	76,30	98,42	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.000.000	176.000.000	122.500.000	-	-	156.275.919	169.658.851	116.140.550	-	-	99,53	96,39	94,80	-	-		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	3.500.000	3.500.000	-	-	-	1.500.000	3.500.000	-	-	-	42,85	100	-	-	-		
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	231.600.000	434.068.600	119.615.000	134.460.200	-	67.682.500	303.023.750	109.198.900	78.238.500	-	29,22	69,81	91,29	-	-		

Sumber : LRA Kecamatan Patianrowo 2018-2022

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo

2.4.1. Tantangan

a. Kecamatan Patianrowo jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yangakibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Patianrowo.

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Patianrowo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

e. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)

f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.

g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah

h. Income perkapita masyarakat masih rendah.

i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Patianrowo

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Patianrowo dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Patianrowo untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Patianrowo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Patianrowo ;

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Patianrowo , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Patianrowo ;

g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Patianrowo. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;

i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Patianrowo. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patianrowo

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Patianrowo ;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Patianrowo ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Patianrowo ;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, rencanapemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Patianrowo sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Patianrowo dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Patianrowo memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Patianrowo, maka dalam pembuatan *Review* / Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan *Riview* / Perubahan Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Patianrowo harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Patianrowo termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Patianrowo sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Patianrowo termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Patianrowo sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Kertosono-Patianrowo-lengkong

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Patianrowo menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan

dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Patianrowo merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Patianrowo yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Review* / Perubahan Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023 sepenuhnya mendukung dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 khususnya pada tujuan 16 yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan,Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yangEfektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Patianrowo, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023,maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patianrowo dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Patianrowo adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indicator kinerja yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan sasaran Kecamatan Patianrowo adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
   Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
   Indikator :Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
   Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2370	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	78,67	80	82	84	86	88	88
			50	88	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	50	80	82	84	86	88	88
			0	88	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	80	82	84	86	88	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Patianrowo dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Patianrowo, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)				
Misi: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	• Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	• Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		• Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa

		• Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Patianrowo selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Patianrowo. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Patianrowo akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode SKPD		Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya snergitas penyelanggaraan tugas-tugas kecamatan	**Meningkatnya Kualitas Pelayianan Publik kepada Masyarakat**	**Indeks Kepuasan masyarakat**	**1**	**19**	**1**		**Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**80%**	**84%**	**113.900.000**	**84%**	**181.750.000**	-	-	-	-	-	-	**84%**	**295.650.000**	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
			1	19	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan Persediaan materai	12 bulan	12 bulan	1.800.000	12 bulan	37.800.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	39.600.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100%	100%	25.000.000	12 bulan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	55.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	1	10	Penyedian alat tulis kantor	tersedianya penyedian alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	21.600.000	12 bulan	20.600.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	42.200.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo

1	19	1	11	Penyedian barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
1	19	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	tersediannya komponen instalasi listrik/ penerangan banguan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
1	19	1	15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	4.000.000	3.000.000	7.000.000	1.750.000	12 bulan
1	19	1	17	Penyedian makan dan minum	tersedianya makan dan minum	12 bulan	12 bulan	17.500.000	16.500.000	34.000.000	1.750.000	12 bulan
1	19	1	18	Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	terlaksananya rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	100%	100%	22.500.000	40.000.000	62.500.000	31.500.000	12 bulan
1	19	1	20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	12.500.000	19.000.000	31.500.000	12 bulan	12 bulan
1	19	1	26	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	tersedianya pengadaan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	1.750.000	-	1.750.000	12 bulan	12 bulan
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
						1.750.000	31.500.000	62.500.000	34.000.000	7.000.000	9.000.000	5.100.000
						Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo
						Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo

1	19	1	26	Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah	Terlaksanya pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah		-	-	12 bulan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	8.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	2		**Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase sarana / prasarana layak fungsi**	**90%**	**90%**	**141.000.000**	**90%**	**119.000.000**	-	-	-	-	-	-	**90%**	**260.000.000**	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
1	19	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pelengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	10.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	20.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	13.000.000	12 bulan	24.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	37.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	2	10	pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	12 bulan	12 bulan	22.500.000	100%	11.500.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	34.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	2	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	100%	70.500.000	12 bulan	45.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	115.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	2	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ oprasional			19.000.000	12 bulsn	22.500.000	-	-	-	-	-	-	100%	41.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo

1	19	2	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor							
1	19	3		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Kehadiran ASN**	-	-	-	-	-	-	-
1	19	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus harian tertentu	-	-	-	-	-	-	-
1	19	3	6	Pelaksanaan senam kesegaran Jasmani	Terlaksanany a senam kesegaran jasmani	-	-	-	-	-	-	-
1	19	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur**	**Prosentase Pegawai dengan kategori nilai SKP "Baik"**	-	-	-	-	-	-	-
1	19	5	4	Peningkatan Kemampuan teknis aparatur	Terpenuhinya penaingkatan kemampuan teknis aparatur	-	-	-	-	-	-	-
1	19	6		**Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Presentasela poran kinerja dan laporan keuangan**	-	**100%**	**3.500.000**	**100%**	**6.000.000**	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	**100%**	100%	12 bulan	100%	**12 bulan**	100%
						-	**9.500.000**	2.000.000	**2.000.000**	2.400.000	7.000.000	**9.400.000**	12.000.000
							Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	**Kec. Patianrowo**	Kec. Patianrowo	Kec. Patianrowo	**Kec. Patianrowo**	Kec. Patianrowo
							Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo	Patianrowo

1	19	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Junlah dokumen laporan kinerja dan ikthiar OPD	100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	4.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	6	2	Penyusunan Pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	100%	100%	500.000	100%	2.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	2.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangn akhir tahun yang disusun		100%	1.000.000	100%	2.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	3.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	**19**	**24**		**Pembinaan Pemerintah , Kelembagaan danmasyarakat Desa / Kelurahan**	**Prosentase Pembinaan Pemerintah Kelembagaa n dan Masyarakat Desa / Kelurahan**	-	**12 bulan**	**231.600.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**12 bulan**	**231.600.000**	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
1	19	24	1	Pembinaan Pemerintah,Kelem bagaan dan masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah Pembinaan kelembagaan dan masyarakat Desa	-	12 bulan	70.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	70.250.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	2	Penyusunan Monografi Kecamatan dan fasilitas penyusunan profil Desa Kelurahan	Jumlah Laporan Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitas penyusunan profil Desa kelurahan	-	12 bulan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	6.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo

1	19	24	3	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamtan	Jumlah Laporan Musrenbang	-	12 bulan	15.850.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	15.850.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	4	Fasilitas Musrenbang Desa / Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang Desa/ Kelurahan	-	12 bulan	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	5.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	5	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen pembinaan Administrasi Pengeloiaan Keungana Desa	-	12 bulan	31.650.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	31.650.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dank ertiban masyarakat	-	12 bulan	35.500.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	35.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	7	Koordinasi dan Pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	-	12 bulan	36.850.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	36.850.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
1	19	24	8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan Daerah	Jumlah Pembinaan dan pemantauan pendapatan Daerah	-	12 bulan	29.500.000	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	29.500.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo

Meningkatnya Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	**,pemberdayaan masyarakat dan desa serta koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti**	1	19	28		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	-	-	-	**12 bulan**	**220.325.000**	-	-	-	-	-	-	**12 bulan**	**220.325.000**	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
		1	19	28	1	Koordinasi fasilitas bidang Pemerintahan	Jumlah data profil / monografi kecamatan yang tersusun	-	-	-	12 bulan	20.875.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	20.875.000	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
		1	19	28	2	Koordinasi dan Fasilitas Bidang Kesejahteraan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Bidang Kesejahteraan masyarakat	-	-	-	12 bulan	36.850.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	36.850.000	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
		1	19	28	3	Koordinasi dan fasilitas bidang ketentreman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitas bidang ketentreman dan Ketertiban	-	-	-	12 bulan	12.550.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	12.550.000	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
		1	19	28	5	Koordinasi dan fasilitas Bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitas Bidang pemberdayaan masyarakat	-	-	-	12 bulan	26.050.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	26.050.000	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo
		1	19	28	6	Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	-	-	-	12 bulan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	10.000.000	**Kec. Patianrowo**	Patianrowo

			1	19	28	7	Pelestarian nilai-nilai nasionalisme kedaerahan dan keagamaan	Jumlah Pelestarian nilai-nilai nasionalisme kedaerahan dan keagamaan	-	-	-	12 bulan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	20.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	28	8	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	-	-	-	12 bulan	24.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	24.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	28	9	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	12 bulan	70.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	70.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
		Presentase Desa yang melakukan tata Kelola yang baik	**1**	**19**	**29**		**Program pembinaan Desa / Kelurahan**	**Tingkat efektifitas pembinaan Desa**	-	-	-	**11 Desa**	**51.975.000**	-	-	-	-	-	-	**11 Desa**	**51.975.000**	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	29	1	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan}	Jumlah Desa yang melaksanakan	-	-	-	11 Desa	10.000.000	-	-	-	-	-	-	11 Desa	10.000.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	29	2	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan	-	-	-	11 desa	40.700.000	-	-	-	-	-	-	11 Desa	40.700.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo
			1	19	29	3	Pembinaan Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Jumlah Desa yag melaksanakan	-	-	-	11 Desa	1.275.000	-	-	-	-	-	-	11 Desa	1.275.000	Kec. Patianrowo	Patianrowo

Sumber. Simda Tahun 2019-2020

Tabel VI.1

Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 - 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	*01*	*0.00*	*00*		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah*	-	-	-	-	-	*84%*	*2.105.161.358*	*86%*	*2.551.657.394*	*88%*	*2.555.812.194*	*88%*	*7.212.630.946*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	*2.01*	*00*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*2.343.500*	*12 bulan*	*1.512.000*	*2 laporan*	*1.671.000*	*2laporan*	*5.531.500*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	12 bulan	2.343.500	12 bulzn	1.512.000	2 laporan	*1.671.000*	2 laporan	5.531.500	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	*2.02*	*00*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Laporan Keuangan SKPD*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*1.914.316.658*	*12 bulan*	*2.122.477.994*	*12 bulan*	*2.1198.802.000*	*12 bulan*	*6.159.272.646*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	-	-	-	-	-	12 bulan	1.911.886.658	14 bulan	2.118.802.994	12 bulan	2.118.802.994	14 bulan	6.149.492.646	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	*2.02*	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	12 bulan	1.350.000	12 bulan	2.885.000	1 Laporan	2.587.500	12 bulan	7.120.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	12 bulan	1.080.000	12 bulan	790.000	2 laporan	815.000	12 bulan	2.660.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	***02***	***06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD***	-	-	-	-	-	***12 bulan***	***39.853.950***	***12 bulan***	***87.312.750***	***12 bulan***	***78.221.250***	***12 bulan***	***205.387.950***	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bulan	1.745.800	12 bulan	9.636.000	1 paket	9.636.000	12 bulan	21.017.800	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	02	Penyadiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	14.283.750	-	-	12 bulan	14.283.750	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01	2.06	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bulan	22.181.250	12 bulan	29.603.750	3 paket	36.245.200	12 bulan	86.581.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bulan	2.732.750	12 bulan	8.155.250	12 bulan	8.155.250	12 bulan	19.043.250	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13	-	-	-	-	-	12 bulan	3.000.000	12 bulan	10.800.000	12 bulan	10.800.000	12 bulan	24.600.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	-	12 bulan	8.200.000	12 bulan	14.834.000	12 bulan	14.560.000	12 bulan	37.868.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.06	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya arsip dinamis	-	-	-	-	-	12 bulan	1.994.150	-	-	-	-	12 bulan	1.994.150	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	***2.07***	***07***	***00***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah***	-	-	-	-	-	***12 bulan***	***6.799.000***	***12 bulan***	***109.392.700***	***12 bulan***	***79.850.000***	***12 bulan***	***196.041.700***	*Kecamatan patianrowo*	*patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01	2.07	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	12 bulan	6.799.000	12 bulan	58.400.000	7 unit	60.862.800	1 tahun	123.199.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.07	05		Pengadaaan Mebel	Tersedianya mebel penunjang	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	37.455.200	12 bulan	21.850.000	12 bulan	59.305.200	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.07	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	13.537.500			12 bulan	13.537.500	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	***2.08***	***08***	***00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	-	-	-	-	-	***12 bulan***	***72.000.000***	***12 bulan***	***85.100.000***	***12 bulan***	***85.480.000***	***12 bulan***	***242.200.000***	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.08	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	-	-	-	-	-	12 bulan	43.200.000	12 bulan	45.500.000	12 bulan	45.880.000	12 bulan	134.200.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.08	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	-	-	-	-	-	12 bulan	28.800.000	12 bulan	39.600.000	12 bulan	39.600.000	12 bulan	108.000.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 1	*2. 09*	*09*	*0 0*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*69.848.250*	*12 bulan*	*145.861.950*	*12 bulan*	*170.625.950*	*12 bulan*	*389.697.150*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 1	2. 09	09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	-	-	-	-	-	12 bulan	21.740.000	12 bulan	36.299.300	12 bulan	36.323.200	12 bulan	94.363.600	*Kecamatan patianrowo*	*patianrowo*
			0 1	2. 09	09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	-	-	-	-	-	12 bulan	4.000.000	12 bulan	13.100.000	12 bulan	23.200.000	12 bulan	46.300.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 1	2. 09	09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	-	-	-	-	-	12 bulan	44.108.250	12 bulan	96.462.650	12 bulan	111.102.750	12 bulan	249.033.550	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Sakip Kecamatan	*0 2*	*2. 02*	*00*	*0 0*	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Meningkatnya tingkat efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban.***	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*70.513.750*	*12 bulan*	*64.357.300*	*7 kegiatan*	*88.853.550*	*90%*	*198.047.600*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 2	*2. 02*	*01*	*0 0*	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Terlaksananya Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Kegiatan dengan Perangkat Daerah***	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*66.314.250*	*12 bulan*	*59.114.200*	*5 kegiatan*	*84.055.200*	*90%*	*184.006.650*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 2	2. 02	01	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	-	-	-	-	-	12 bulan	66.314.250	12 bulan	59.114.200	5 kegiatan	84.055.200	12 bulan	184.006.650	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 2	*2. 03*			***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	***Terpenhinya sarana dan prasarana Kantor Kecamatan***	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	*4.199.500*	*12 bulan*	*5.243.100*	*2 Kegiatan*	*4.798.350*	*12 bulan*	*14.040.950*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 2	2. 03	01		Koorddinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan / atau Intensi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terpenuhinya saran dan Prasarana Kantor Kecamatan Patianrowo	-	-	-	-	-	12 bulan	4.199.500	12 bulan	5.243.100	2 kegiatan	4.798.350	12 bulan	14.040.950	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai Sakip Kecamatan	*03*	*2.01*			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti***	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*18.105.700*	*12 bulan*	*25.122.950*	*15 kegiatan*	*34.531.500*	*90%*	*75.360.150*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			03	*2.01*	*00*		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaaan Desa***	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*18.105.700*	*12 bulan*	*25.122.950*	-	-	*12 bulan*	*43.228.650*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.01	00	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Mayarakat dalam forum Musyawarah Kecamatan yang di fasilitasi	-	-	-	-	-	12 bulan	13.795.150	12 bulan	11.081.500	2 kegiatan	18.481.500	12 bulan	43.508.150	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			01	2.01	00	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi	-	-	-	-	-	12 bulan	4.310.550	12 bulan	14.041.450	13 kegiatan	16.050.000	100%	31.852.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban umum	Nilai Sakip Kecamatan	*0 4*	*0. 00*	*00*		*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	*Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*13.715.550*	*12 bulan*	*19.554.700*	*4 kegiatan*	*19.054.700*	*100%*	*52.824.950*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 4	*2. 02*	*00*		*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah*	*Terlaksanyana Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*13.715.550*	*12 bulan*	*19.554.700*	*4 kegiatan*	*19.054.700*	*100&*	*52.824.950*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			0 4	2. 02	01		Koordinasi / sinergi dengan perangkat Daerah yang tuggas dan fungsinya i bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / Kepolisian negara republik indonesia	Terlaksananya Koordinasi / Sinergitas dengan instansi	-	-	-	-	-	12 bulan	13.715.550	12 bulan	19.554.700	4 kegiatan	19.054.700	100%	52.824.950	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Nilai Sakip Kecamatan	*0 5*	*2. 01*	*00*		*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	*Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*5.460.500*	*12 bulan*	*28.875.000*	*100 orang*	*138.867.000*	*100%*	*6.3.110.500*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			05	*2.01*			*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Terselenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	-	-	-	-	*12 bulan*	*5.460.500*	*12 bulan*	*28.875.000*	*100 Orang*	*138.867.000*	*12 bulan*	*34.335.500*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indosnesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang di laksanankan	-	-	-	-	-	12 bulan	5.460.500	12 bulan	28.875.000	100 orang	138.867.000	100%	93.110.500	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentasc desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	*06*	*0.00*	*00*		***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	*Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	-	-	-	-	*90%*	*33.015.050*	*90%*	*48.466.600*	*12 Kegiatan*	*35.984.000*	*90%*	*120.065.650*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			06 2.01 00	*Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	-	-	-	-	*11 desa*	*33.015.050*	*11 Desa*	*48.466.600*	*12 kegiatan*	*35.984.000*	*11 desa*	*120.065.650*	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasiu Tata Pemerintahan Desa Yang di fasilitasi	-	-	-	-	-	11 desa	3.575.000	11 desa	17.592.000	5 kegiatan	18.442.000	11 desa	18.042.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			06 2.01 03	Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayaguaan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	2.250.000	1 kegiatan	2.600.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			06 2.01 09	Fasilitas sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	-	-	-	-	-	11 Desa	25.350.000	11 Desa	15.492.000	3 kegiatan	7.192.000	11 desa	50.334.000	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*
			06 2.01 11	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	-	-	-	-	-	11 Desa	2.965.050	11 Desa	6.232.600	-	-	11 Desa	9.197.650	*Kecamatan patianrowo*	*Patianrowo*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 6 .	2. 01	12		Fasilitasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Terpenuhinya pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakan	-	-	-	-	-	12 bulan	1.125.000	12 bulan	9.150.000	3 kegiatan	8.100.000	100 %	8.450.000	*Kecamatan pattamrowo*	*Pattamrowo*

Sumber. SIPD Tahun 2021-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Jatikalen menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Patianrowo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Patianrowo terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

VII.I. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecematan adalah penilaian umum Mengkonfirmasi Kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan Pemeritahan yang mempertahankan aspek-aspek:

1. Aspek Kesejahteraan
2. Aspek Pemberdayaan
3. Aspek Perekonomian
4. Aspek Perencanaan
5. Aspek Hukum
6. Aspek PKK
7. Aspek Trantib
8. Aspek Pemerintahan
9. Aspek Inovasi

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahu n-4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan 9. Aspek Inovasi	2444,5	432	833,8	84	84,5	85	85

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Patianrowo adalah :

a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
c. Tingkat kehadiran ASN
d. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
e. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey Kepuasan Masyarakat	88,28	82,33	83,78	84	84,5	85	85
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum Prasarana\ Layak\ Fungsi}{\sum Seluruh\ Prasarana} x100\ \%$	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{Hasil\ Absensi\ ASN\ Kehadiran\ ASN}{\sum\ ASN} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum Laporan\ Kinerja\ dan\ Laporan\ Keuangan\ yang\ tepat\ waktu}{\sum Seluruh\ laporan\ kinerja\ dan\ keuangan} x100\ \%$	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
5	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	$\frac{\sum Nilai\ SKP}{\sum Seluruh\ ASN} x100\ \%$	82,62	83,64	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum Hasil\ Koordinasi\ di\ bidang\ tertentu}{\sum Seluruh\ Koordinasi} x100\ \%$	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	$\frac{\sum Pembinaan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Seluruh\ pembinaan} x100\ \%$	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Review / Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patianrowo 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Patianrowo dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, *Review* / Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Review / Perubahan erencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. *Review* / Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. *Review* / Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. *Review* / Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.

4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.

Nganjuk, 11 Maret 2022
a.n. BUPATI NGANJUK
PLT. CAMAT PATIANROWO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO

TONI SOESANTO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19801123 199912 1 003